



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ IP)



KANTOR KESBANGPOLINMAS
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil 'alamiin, kami panjatkan segala puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2018. LKjIP SKPD Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen nyata Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP tahun 2018 yang berisi tentang perencanaan dan capaian kinerja RPJMD 2016 - 2021 adalah wujud pertanggungjawaban kami kepada masyarakat tentang kinerja kami selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP. Berdasarkan hasil evaluasi dan pengukuran yang kami lakukan pencapaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak tahun 2018 adalah sebesar 97,35 %.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ini kami susun, dengan harapan dapat memacu kami untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang serta dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Demak, Januari 2019

KEPALA KANTOR KESBANGPOLINMAS
KABUPATEN DEMAK



AGUS HERAWAN, S.IP, MM/
Pembina Tingkat I
NIP. 19710612 199003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Aspek Straegis dan Permasalahan yang dihadapi	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategi	4
B. Rencana Kinerja Tahunan	9
C. Perjanjian Kinerja	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018	
A. Capaian Kinerja Organisasi	12
B. Realisasi Anggaran	29
BAB IV PENUTUP	
A. Tujuan Umum Pencapaian Target Kinerja Kantor Kesbangpolinmas	32
B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang	32
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Demak, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak merupakan lembaga teknis daerah yang bertugas melaksanakan dan menyusun kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, hubungan antar lembaga dan perlindungan masyarakat.

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak merupakan lembaga teknis daerah yang berbentuk kantor dan dipimpin oleh Kepala Kantor adalah penunjang pemerintah daerah.

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak beralamat di Jl. Kyai Jebat No. 30 Demak di posisi sebelah barat kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Demak dengan nomor fax (0291) 685664 dan nomor telepon (0291) 681773.

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
5. Seksi Perlindungan Masyarakat.

Adapun struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesbangpolinmas



Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Kantor Kesbangpolinmas mempunyai 10 (sepuluh) orang pegawai berstatus PNS dan 4 (empat) orang pegawai berstatus honorer/kontrak.

B. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Keberadaan Kantor Kesbangpolinmas sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2008 adalah sebagai lembaga teknis daerah yang bertugas melaksanakan kebijakan dan menyusun kebijakan bidang kesatuan bangsa, politik, hubungan antar lembaga dan perlindungan masyarakat.

Tahun 2018 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2016-2021, sebagaimana misi Kabupaten Demak yang ingin dicapai yaitu **misi ke 1 (satu) yaitu *Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat*** dan mendukung Misi ke-6 yaitu Menciptakan Keamanan, Ketertiban dan Lingkungan yang Kondusif. Namun demikian pemilihan perangkat desa yang telah dilaksanakan ternyata menimbulkan banyak kekecewaan dari para calon perangkat yang tereliminir dan pasca pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat tauhid serta banyak beredarnya berita bohong (Hoax) menjelang Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif Tahun 2019 menjadi potensi kerawanan yang perlu diantisipasi, maka terciptanya kondusifitas wilayah sangat diperlukan sehingga

berkontribusi positif terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Penciptaan kondusifitas dilakukan melalui pelaksanaan program kegiatan, meliputi Kemitraan pengembangan Wasbang, pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat dan pendidikan politik masyarakat.

Permasalahan utama yang dihadapi Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Demak tahun 2018 adalah :

1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat berdampak pada situasi dan kondisi wilayah. Kecenderungan yang terjadi di seluruh wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di Kabupaten Demak, peristiwa / kejadian yang terjadi di wilayah lain apabila tidak segera diantisipasi berpotensi dapat terjadi di Kabupaten Demak.
2. Keterbatasan SDM Kesbangpolinmas baik secara kuantitas maupun kualitas berpengaruh pada kurang akuratnya (validitas) ketersediaan data Kesbangpolinmas baik yang bersifat statis maupun dinamis.
3. Masih lemahnya pengelolaan data yang bersifat dinamis terutama menyangkut validitas dan keakuratan data yang ada di Kesbangpolinmas.
4. Secara umum situasi dan kondisi wilayah Kabupaten Demak kondusif, meskipun demikian masih terdeteksi adanya potensi kerawanan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya yang patut diwaspadai.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 5 (lima) tahun.

Sebagai suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu lima tahun, penyusunan Renstra harus memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul.

Renstra Kantor Kesbangpolinmas Tahun 2016 – 2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh Aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2016 sampai dengan 2021.

Rencana Strategis Kantor Kesbangpolinmas Tahun 2016–2021 dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2016–2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2016–2021.

1. Visi

Dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Perangkat Daerah tidak lagi menyusun visi dan misi perangkat daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Demak, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menjalankan tugas dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Demak yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Demak tahun 2016-2021 dengan visinya yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Demak yang Agamis, Lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis”**,

Adapun Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Demak yang Agamis

Yaitu kondisi masyarakat yang di dalamnya tertanam nilai-nilai agama yang melekat pada setiap perilaku warganya, ditambah dengan simbol-simbol keagamaan secara substansial yang melekat pada setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahnya.

2. Masyarakat Demak yang Sejahtera

Yaitu terpenuhinya dua kriteria hidup masyarakat :

- a. Pertama, terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat, baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatannya.
- b. Kedua, terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya buah sistem ekonomi semata; melainkan juga buah sistem hukum, sistem politik, sistem budaya, dan sistem sosial.

3. Masyarakat Demak yang Mandiri

Yaitu meningkatnya kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan kewenangannya, serta menciptakan kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan mengelola potensi dirinya sendiri (*sesuai dengan kapasitasnya masing-masing*) untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi. Masyarakat diposisikan sebagai *subyek* bukan *obyek*, masyarakat turut berperan aktif dalam pembangunan serta menjadikan masyarakat itu sendiri sebagai *agent of change* bagi masyarakat lainnya. Kemandirian lebih dititik beratkan pada perubahan pola pikir, pemerintah berperan sebagai inisiator, fasilitator dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pada saatnya meminimalisir ketergantungan dan harapan bantuan pihak lain.

4. Masyarakat Demak yang Maju

Yaitu masyarakat Demak yang mampu membawa daerahnya berada di depan dibanding daerah lain dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, perekonomian, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, keagamaan dan berbagai sendi kehidupan lainnya dengan tetap memperhatikan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan serta mengedepankan potensi dan kearifan lokal.

5. Masyarakat Demak yang Kompetitif

Yaitu fokus pada pengelolaan potensi sumber daya alam, didukung dengan kemampuan sumber daya manusia yang baik, sehingga mampu menghasilkan dan mengembangkan potensi daerah yang berkualitas serta memiliki daya saing tinggi sekaligus dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

6. Masyarakat Demak yang Kondusif

Yaitu masyarakat Demak yang memiliki daerah dengan situasi aman, nyaman yang mendukung untuk berinvestasi, disertai kualitas pelayanan aparatur yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) agar tercipta pembangunan yang seimbang di berbagai sektor.

7. Masyarakat Demak yang Berkepribadian

Kepribadian adalah gabungan keseluruhan dari sifat-sifat yang tampak dan dapat dilihat dalam bentuk perilaku. Perilaku tersebut secara keseluruhan didasarkan pada nilai-nilai yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Nilai-nilai yang mendasari kepribadian tersebut antara lain nilai-nilai agama yang diyakini, nilai sosial, moral, etika dan estetika sehingga menjadi karakter atau kepribadian masyarakat.

8. Masyarakat Demak yang Demokratis

Yaitu mengutamakan persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan bagi semua warga masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih mengedepankan pada pelayanan yang didasarkan pada prinsip dan nilai-nilai demokrasi yang berupa persamaan hak dan kewajiban, serta mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Adapun misi Kabupaten Demak tahun 2016-2021 yaitu:

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien dan akuntabel.
3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran.
4. Mengakselerasikan pembangunan infrastruktur strategis, pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan antara kota dan desa.
5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial sesuai standar.
6. Menciptakan keamanan, ketertiban dan lingkungan yang kondusif.
7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk.
8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
9. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan.

Berdasarkan misi tersebut di atas, Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Demak mengemban ***misi ke 1 (satu) yaitu Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat*** dan mendukung ***misi ke 6 (enam) yaitu Menciptakan keamanan, ketertiban dan lingkungan yang kondusif.***

3. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu-isu strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Guna mewujudkan misi yang diemban tersebut tersebut, Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Demak tujuan yang akan dicapai oleh yaitu :

1. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kerjasama dengan stakeholder dan masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan, nilai keagamaan serta kerukunan antar / intra umat beragama.

2. Meningkatkan koordinasi serta komitmen antara aparat, pam swakarsa dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban wilayah.
3. Mewujudkan wilayah Kabupaten Demak yang bebas dari penyalahgunaan Narkoba khususnya dikalangan pelajar dan generasi muda.
4. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman politik masyarakat.

4. Strategi

Guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka diperlukan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas wawasan kebangsaan dan kerukunan antar / intra umat beragama di masyarakat melalui berbagai media antara lain fasilitasi, outbond, seminar, sarasehan, talkshow, diskusi, FGD dan lainnya serta penguatan peran FKUB dalam kerukunan umat beragama.
2. Meningkatkan upaya deteksi dan cegah dini dalam rangka mewujudkan kondusifitas wilayah serta pencegahan melalui koordinasi, sinergitas antar instansi dan pemberdayaan tokoh agama, tokoh masyarakat.
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat terutama dikalangan pelajar tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi serta razia / operasi di tempat – tempat hiburan dan atau tempat umum pada saat jam sekolah.
4. Meningkatkan pemahaman politik masyarakat, Ormas dan Parpol melalui penyuluhan, pembinaan, pendampingan dan kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan.

5. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesadaran aparat dan stakeholder terhadap nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai keagamaan kerukunan antar / intra umat beragama.
2. Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah serta terdeteksinya potensi kerawanan sosial.

3. Menurunnya jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba di kalangan generasi muda pelajar Kabupaten Demak.
4. Meningkatnya kehidupan berdemokrasi dan partisipasi politik masyarakat.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak dengan Bupati Demak tahun 2018, upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan terus dilakukan. Guna mewujudkan tercapainya target kinerja tersebut, pada tahun 2017 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat telah melaksanakan 7 (tujuh) program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan dengan perincian 3 program dan 18 kegiatan rutin kantor serta 4 program dan 16 kegiatan urusan wajib yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 2.402.000.000,-.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Penjabaran yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Demak sebagaimana RPJMD lainnya hanya berisikan perencanaan yang global dengan penjelasan hanya sampai kepada Program. Oleh karenanya diperlukan perencanaan yang bersifat detail yaitu penjabaran kegiatan. Perencanaan yang lebih detail tadi disebut dengan Rencana Kerja.

Adapun Rencana Kinerja Kantor Kesbangpolinmas Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahunan (Tahun 2018)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2018
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kesadaran aparat dan stakeholder terhadap nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai keagamaan serta kerukunan antar / intra umat beragama	Presentase ormas yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	Persen	50
		Persentase Ormas aktif	Persen	38,89
		Kasus Konflik Antar Umat Beragama	Kasus	Tidak ada
		Keberadaan Aliran yang menyimpang dari nilai agama	Kasus	Tidak ada

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2018
1	2	3	4	5
2.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah serta terdeteksinya potensi kerawanan sosial	Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat	Persen	100
3.	Menurunnya jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba di kalangan generasi muda pelajar Kabupaten Demak	Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba di kalangan generasi muda	Persen	100
4.	Meningkatnya kehidupan berdemokrasi dan partisipasi politik masyarakat	Persentase peningkatan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	Persen	20
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen	70%

C. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Demak pada tahun 2018 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Demak untuk mewujudkan target kinerja sesuai tabel berikut.

Perubahan dalam dokumen perjanjian kinerja Kantor Kesbangpolinmas disebabkan pengurangan Dana Alokasi Umum yang diberikan pada Kabupaten/Kota, sehingga penganggaran program kegiatan perlu dilakukan rasionalisasi, namun demikian dengan merebaknya berita bohong menjelang Pemilu serentak tahun 2019 dan disinyalir dapat menciptakan perpecahan bangsa beberapa kegiatan ditambahi yang merupakan pokok pikiran Anggota DPRD Kabupaten Demak Yaitu :

1. Terjadi pengurangan anggaran / rasionalisasi anggaran di seluruh SKPD se Kabupaten Demak.
2. Terjadi pergeseran anggaran (d disesuaikan dengan prioritas kebutuhan pendanaan).

3. Adanya penambahan anggaran untuk kegiatan Apel Kebangsaan dan Operasional Saber Pungli Kabupaten Demak.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya kesadaran aparat dan stakeholder terhadap nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai keagamaan serta kerukunan antar / intra umat beragama	Presentase ormas yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	50
	Persentase Ormas aktif	38,89
	Kasus Konflik Antar Umat Beragama	Tidak ada
	Keberadaan Aliran yang menyimpang dari nilai agama	Tidak ada
Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah serta terdeteksinya potensi kerawanan sosial	Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat	100
Menurunnya jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba di kalangan generasi muda pelajar Kabupaten Demak	Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba di kalangan generasi muda	100
Meningkatnya kehidupan berdemokrasi dan partisipasi politik masyarakat	Persentase peningkatan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	20
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	70

Program	Anggaran (Rp)	Ket
Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	450.000.000	Sumber APBD Demak
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	780.000.000	Sumber APBD Demak
Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	30.000.000	Sumber APBD Demak
Pendidikan Politik Masyarakat	480.000.000	Sumber APBD Demak

Setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan APBD Perubahan, maka Perjanjian Kinerja Tahun 2018 pada Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Demak sebagai berikut.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Anggaran (Rp)	
		Awal	Perubahan	Awal	Perubahan
1	2	3			4
Meningkatnya kesadaran aparat dan stakeholder terhadap nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai keagamaan serta kerukunan antar / intra umat beragama	Presentase ormas yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	50	50	450.000.000	634.150.000
	Persentase Ormas aktif	38,89	38,89		
	Kasus Konflik Antar Umat Beragama	Tidak ada	Tidak ada		
	Keberadaan Aliran yang menyimpang dari nilai agama	Tidak ada	Tidak ada		
Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah serta terdeteksinya potensi kerawanan sosial	Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat	100	100	780.000.000	928.000.000
Menurunnya jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba di kalangan generasi muda pelajar Kabupaten Demak	Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba di kalangan generasi muda	100	100	30.000.000	30.000.000
Meningkatnya kehidupan berdemokrasi dan partisipasi politik masyarakat	Persentase peningkatan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	20	20	480.000.000	461.517.000
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	70	70		

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	% rata-rata pencapaian sasaran
1	2		3	4	5	6
Meningkatnya kesadaran aparat dan stakeholder terhadap nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai keagamaan serta kerukunan antar / intra umat beragama	Presentase ormas yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	Persen	50	50	100	98,48
	Persentase Ormas aktif	Persen	38,89	36,53	93,93	
	Kasus Konflik Antar Umat Beragama	Kasus	Tidak ada	Tidak ada	100	
	Keberadaan Aliran yang menyimpang dari nilai agama	Kasus	Tidak ada	Tidak ada	100	
Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah serta terdeteksinya potensi kerawanan sosial	Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat	Persen	100	100	100	100
Menurunnya jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba di kalangan generasi muda pelajar Kabupaten Demak	Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba di kalangan generasi muda	Persen	100	100	100	100
Meningkatnya kehidupan berdemokrasi dan partisipasi politik masyarakat	Persentase peningkatan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	Persen	20	20	100	91,06
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen	70	57,48	82,11	

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi Pemerintah Kabupaten Demak.

Pada pembahasan pengukuran kinerja atas kebijakan, program, maupun kegiatan dilakukan dengan membandingkan rencana dengan realisasinya dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan. Pengukuran kinerja diuraikan melalui Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), Akuntabilitas Keuangan maupun Evaluasi dan Analisis Kinerja.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai :

- a. Kurang dari 49 : Kurang
- b. 50 s/d 79 : Cukup baik
- c. 80 s/d 89 : Baik
- d. 90 s/d 100 : Amat baik

Hingga akhir tahun 2018, Kantor Kesbangpolinmas hampir seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya telah dilaksanakan, hanya beberapa program kegiatan yang belum terlaksana 100%. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut :

3.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Tabel 3.1

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Dari 8 Indikator Kinerja Kantor Kesbangpolinmas tahun 2018, 6 (enam) indikator menunjukkan capaian 100%, 2 (dua) indikator menunjukkan capaian kurang 100%, yaitu 1 (satu) indikator 93,93% dan 1 (satu) indikator 82,11%.

Penghitungan persentase pencapaian target kinerja menggunakan dua cara, yaitu :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ pencapaian kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ pencapaian kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penerapan rumus pertama digunakan untuk menghitung persentase capaian pada seluruh indikator kecuali indikator jumlah kasus konflik antar umat beragama. Dimana khusus untuk indikator jumlah kasus konflik antar umat beragama dihitung dengan menggunakan rumus kinerja negatif.

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Selama Lima Tahun

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Selama 5 Tahun

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Presentase ormas yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	Persen	22	33	50	--	--	--
Persentase Ormas aktif	Persen	22,22	24,45	36,53	--	--	--
Kasus Konflik Antar Umat Beragama	Kasus	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	--	--	--
Keberadaan Aliran yang menyimpang dari nilai agama	Kasus	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	--	--	--
Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat	Persen	100	100	100	--	--	--
Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba di kalangan generasi muda	Persen	100	100	100	--	--	--
Persentase peningkatan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	Persen	20	20	20	--	--	--
Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen	Tidak ada pemilu	Tidak ada pemilu	57,48	--	--	--

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d tahun 2018	%
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kesadaran aparat dan stakeholder terhadap nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai keagamaan serta kerukunan antar / intra umat beragama	Presentase ormas yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	Persen	78	50	64,1
	Persentase Ormas aktif	Persen	66,67	36,53	54,79
	Kasus Konflik Antar Umat Beragama	Kasus	Tidak ada (0)	Tidak ada (0)	100
	Keberadaan Aliran yang menyimpang dari nilai agama	Kasus	Tidak ada (0)	Tidak ada (0)	100
Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah serta terdeteksinya potensi kerawanan sosial	Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat	Persen	100	100	100
Menurunnya jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba di kalangan generasi muda pelajar Kabupaten Demak	Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba di kalangan generasi muda	Persen	100	100	100
Meningkatnya kehidupan berdemokrasi dan partisipasi politik masyarakat	Persentase peningkatan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	Persen	100	40	40
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen	70	57,48	82,11

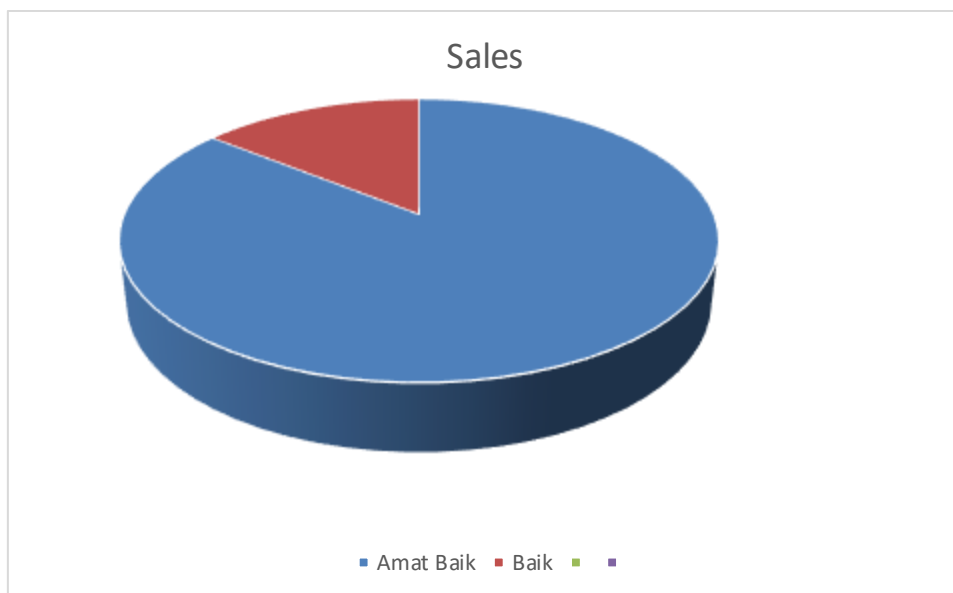
Dari 8 Indikator Kinerja Kantor Kesbangpolinmas sebagaimana tercantum dalam Renstra 2016 - 2021, ada 6 (enam) indikator yang menunjukkan capaian 100%. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan

pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut. Untuk sejumlah target kinerja SKPD yang tingkat pencapaiannya belum mencapai 100 % masih diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus, dan terarah dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi.

Dari 8 indikator tersebut sebanyak 2 indikator kinerja memiliki capaian kurang dari 100 % yaitu 93,93% dan 82,11%.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 terdapat 6 indikator menunjukkan capaian tinggi/amat baik, 1 indikator dengan capaian cukup tinggi/baik.

Diagram 3.1
**Tingkat Capaian Kinerja Indikator Thdp
Target Renstra 2016 - 2021**



B. **Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan**

- 1. Sasaran 1** (Meningkatnya peran aparat dan stakeholder terhadap penguatan nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai keagamaan serta kerukunan antar / intra umat beragama)

Meningkatnya peran aparat dan steakholder terhadap penguatan nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai keagamaan serta kerukunan antar/intra umat beragama salah satunya ditandai dengan keterlibatan aparat dan steakholder dalam kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan, Forum-forum kebangsaan dan

juga LSM/Ormas sebagai stakeholder Kantor Kesbangpolinmas turut serta berperan dalam penguatan nilai kebangsaan, kerukunan umat beragama baik secara mandiri maupun dengan fasilitasi kegiatan.

Pemahaman pengembangan wawasan kebangsaan ditandai ketika tatanan kehidupan bermasyarakat berjalan dengan tertib, teratur, nyaman dan aman tanpa terjadi benturan yang disebabkan karena masalah sosial, mengindikasikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam wawasan kebangsaan telah terpatut dalam jiwa masyarakat. Dan begitu sebaliknya, ketika nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat memudar, maka perilaku kehidupan sosial kemasyarakatan akan memprihatinkan. Sentimen dan fanatisme suku, agama, ras dan antar golongan semakin menonjol sehingga seringkali rentan terhadap terjadinya gesekan-gesekan dan konflik bernuansa SARA di masyarakat.

Konflik komunal adalah konflik yang terjadi antar komunitas yang disebabkan antara lain karena masalah etnis, SARA, agama. Eskalasi konflik komunal yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia dikhawatirkan bisa merambah ke wilayah lain, termasuk wilayah Kabupaten Demak.

Untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik komunal di wilayah Demak maka Kantor Kesbangpolinmas yang dalam salah satu tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kerjasama dengan stakeholder dan masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan, nilai keagamaan serta kerukunan antar/intra umat beragama.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka untuk mengukur sasaran meningkatnya peran aparat dan stakeholder terhadap penguatan nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai keagamaan serta kerukunan antar / intra umat beragama dilihat dari pencapaian atas empat indikator yaitu jumlah presentase ormas yang mendapatkan peningkatan wasbang, prosentase ormas aktif, konflik antar umat beragama dan keberadaan aliran yang menyimpang dari nilai agama.

Secara umum dapat dinyatakan bahwa pencapaian kinerja indikator yang ada dalam sasaran ini sesuai yang ditargetkan, bahkan ada satu indikator yang melebihi target indikator.

Selama tahun 2018 sampai dengan prosentase ormas yang mendapatkan peningkatan wasbang sudah mencapai target yaitu sebesar 50%, dan konflik antar umat beragama serta keberadaan aliran kepercayaan yang menyimpang dari nilai agama tidak ada, sementara presentase ormas aktif bisa mencapai target.

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

- 1) Kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap pemerintah cukup tinggi;
- 2) Adanya figur pemimpin (baik itu tokoh agama maupun tokoh masyarakat) yang mengakar kuat ke masyarakat;
- 3) Tingkat kesadaran stakeholder dalam peningkatan pengembangan wawasan kebangsaan.
- 4) Pemahaman masyarakat dalam beragama yang baik sehingga tumbuh saling menghormati dalam kehidupan beragama.
- 5) Adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pencapaian kinerja sasaran adalah :

- 1) perkembangan teknologi yang sangat pesat disatu sisi membuat masyarakat melek informasi namun disisi lain tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh terhadap pola pikirnya, sehingga terkadang persoalan yang disuarakan tidak selalu diketahui secara detail (hanya ikut-ikutan saja).
- 2) Permasalahan SARA adalah isu yang sangat strategis. Suatu kejadian yang pada awalnya tidak bersumber dari permasalahan SARA, dengan adanya provokasi dari pihak lain dapat beralih menjadi isu SARA.
- 3) Masih kurangnya kesadaran ormas/LSM untuk mendaftarkan/ memberitahukan kegiatan/aktifitas kepada pemerintah dan mendaftarkan/memberitahukan kembali ormas/LSM yang telah berganti kepengurusan.
- 4) Peraturan yg dianggap berbelit dalam mendaftar di kesbangpol/dirjen Polpum, ormas lebih suka merubah menjadi perkumpulan yang berbadan hukum dan mendaftarkan di Kementrian Hukum dan HAM

c. Strategi / upaya penyelesaian masalah :

- 1) Peningkatan pelaksanaan pemantauan terhadap kegiatan/gerakan yang diprediksi berpotensi menimbulkan konflik atau permasalahan di masyarakat.
- 2) Memberdayakan dan meningkatkan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam setiap penyelesaian permasalahan.
- 3) Perbaiki pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Peningkatan pemahaman keberagaman masyarakat, sehingga tidak merasa paling benar sendiri dan timbul aliran keagamaan yang berakibat timbulnya konflik antar/intra umat beragama.
- 5) Monitoring dan mensosialisasikan kepada ormas/LSM untuk mendaftarkan/memberitahukan keberadaan dan aktifitas/kegiatan yang dilaksanakan, dan memberitahukan/melaporkan bila terjadi perubahan kepengurusan.

d. Program dan Kegiatan Pendukung

Guna mendukung tercapainya kinerja sasaran 1 maka dibuat Program dan Kegiatan yang menjadi Pendukung Sasaran 1 yaitu Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan prosentase penyerapan anggaran sebesar 96,47 % dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wasbang penyerapan anggaran 100%;
2. Seminar, Talkshow, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan penyerapan anggaran 100%;
3. Pentas Seni dan Buaya, Festival, Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan penyerapan anggaran 89,05%;
4. Peningkatan Pendahuluan Bela Negara penyerapan anggaran 90,43%
5. Pembentukan dan Pembinaan Paskibraka penyerapan anggaran 99,84%
6. Apel Kebangsaan bagi Pemuka di Kabupaten Demak penyerapan anggaran 98,80%

Tabel Program dan kegiatan pendukung sasaran 1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran	% Penyerapan Anggaran
1.	Meningkatnya kesadaran aparat dan stakeholder terhadap nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai keagamaan serta kerukunan antar / intra umat beragama	Presentase ormas yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	96,47
Persentase Ormas aktif		1. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wasbang	100	
Kasus Konflik Antar Umat Beragama		2. Seminar, Talkshow, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	100	
Keberadaan Aliran yang menyimpang dari nilai agama		3. Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wasbang	89,05	
Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu		4. Peningkatan Pendahuluan Bela Negara. 5. Pembentukan dan Pembinaan Paskibraka 6. Apel Kebangsaan bagi Pemuka di Kabupaten Demak	90,43 99,84 98,80	

e. Efisiensi Sumber Daya Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	% Capaian Kinerja keseluruhan ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)	Tingkat Efektifitas (%)
1.	Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat	Presentase ormas yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	98,48	96,47	3,53	103,53
Persentase Ormas aktif							
Kasus Konflik Antar Umat Beragama							
Keberadaan Aliran yang menyimpang dari nilai agama							

2. Sasaran 2 (Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah)

Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan salah satunya ditandai dengan ketenangan masyarakat dalam menjalankan segala aktivitasnya tanpa terganggu adanya hal-hal yang membuat ketenangan serta kenyamanan hidupnya terusik.

Pada sisi lain meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan juga ditandai dengan penanganan potensi konflik sosial yang ada di masyarakat dapat terselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan konflik sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka untuk mengukur sasaran meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan dilihat dari pencapaian atas indikator yaitu presentase penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat.

Secara umum dapat dinyatakan bahwa pencapaian kinerja indikator yang ada dalam sasaran ini telah sesuai yang ditargetkan. Presentase penanganan konflik yang terjadi di masyarakat dapat dicegah sebelum konflik itu terjadi dengan cara-cara mengintensifkan pola cegah dini dan deteksi dini serta pemantauan dan pengamanan wilayah terpadu.

Selama tahun 2018 tidak ada konflik yang menonjol terjadi di wilayah Kabupaten Demak.

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

- 1) Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Demak telah memperhatikan analisis dampak lingkungan dan sosial.
- 2) Adanya regulasi yang jelas dari Pemerintah pusat terkait kerukunan umat bergama, penanganan konflik sosial pada penciptaan suasana kondusif di masyarakat.
- 3) Adanya peningkatan peran masyarakat dalam upaya cegah dini dan deteksi dini.

b. Faktor-faktor Penghambat pencapaian kinerja sasaran

Perkembangan teknologi yang sangat pesat disatu sisi membuat masyarakat melek informasi namun disisi lain tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh terhadap pola pikirnya, sehingga terkadang persoalan yang disuarakan tidak selalu diketahui secara detail (hanya ikut-ikutan saja) dan adanya kesenjangan ekonomi, sosial serta kebergamaan yang cenderung cepat memicu terjadinya konflik di masyarakat. Kasus pembakaran bendera bertuliskan kalimat Tauhid di Garut bisa memicu konflik di Kabupaten Demak, namun tokoh agama dan tokoh masyarakat

bersama forkopimda segera melaksanakan sinergitas untuk menyatukan persepsi dan menghindari konflik yang terjadi.

c. Strategi / upaya penyelesaian masalah :

- 1) Perbaiki pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya deteksi dini dan cegah dini.
- 3) Peningkatan pelaksanaan kegiatan pemantauan terhadap kegiatan yang diprediksi berpotensi menimbulkan permasalahan di masyarakat atau rawan menyulut konflik.

d. Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 2

Program yang menjadi Pendukung tercapainya kinerja **Sasaran 2** adalah Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Kemanan prosesntase penyerapan anggaran sebesar 97,00 % dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Koordinasi Aparat dalam Rangka Pengamanan Wilayah Terpadu penyerapan anggaran 95,82%;
- 2) Peningkatan Koordinasi pelaksanaan tugas antar Instansi dalam upaya deteksi dini dan cegah dini penyerapan anggaran 100%;
- 3) Peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan dan penanganan konflik sosial penyerapan anggaran 97,50%;
- 4) Operasional Satgas Saber Pungli Kabupaten Demak penyerapan anggaran 96,28%
- 5) Peningkatan Koordinasi Aparat dalam Rangka Pengamanan Wilayah Terpadu dalam pelaksanaan Pemilu penyerapan anggaran 96,01%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran	% Penyerapan Anggaran
1.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah serta terdeteksinya potensi kerawanan sosial	Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 1. Peningkatan Koordinasi Aparat dalam rangka pengamanan wilayah terpadu 2. Peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas antar	97,00 95,82 100

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran	% Penyerapan Anggaran
			instansi dalam upaya deteksi dini dan cegah dini	
			3. Peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan dan penanganan konflik sosial	97,50
			4. Operasional Satgas Saber Pungli Kabupaten Demak	96,28
			5. Peningkatan Koordinasi Aparat dalam Rangka Pengamanan Wilayah Terpadu dalam pelaksanaan Pemilu	96,01

e. Efisiensi Sumber Daya Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	% Capaian Kinerja keseluruhan ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)	Tingkat Efektifitas (%)
1.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah serta terdeteksinya potensi kerawanan sosial	Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	100	97,00	2,34	102,40

3. Sasaran 3 (Menurunnya kasus hukum penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan generasi muda pelajar Kabupaten Demak)

Penyalahgunaan Narkoba hingga kapanpun akan senantiasa merugikan kita semua, bahkan mengancam ketahanan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat merajalela. Hal ini terlihat dengan makin banyaknya pengguna narkoba dari semua kalangan mulai dari artis, pejabat bahkan remaja termasuk pelajar. Mereka merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin di negeri tercinta ini. Peredaran narkoba yang terus meningkat. Melihat kenyataan yang terjadi dan dampak negatifnya yang sangat besar dimasa yang akan datang, maka semua elemen bangsa ini, seperti pemerintah, aparat penegak hukum, institusi pendidikan dan masyarakat harus bahu membahu melakukan gerakan perang narkoba secara serius dan terus menerus, baik

dengan pendekatan preventif maupun represif, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba ini dapat berjalan dengan efektif.

Berdasarkan capaian indikator kinerja tersebut di atas secara umum dinyatakan bahwa pencapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan (tidak adanya kasus penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar/generasi muda). Meskipun secara realita tidak dapat dipungkiri bahwa kasus hukum penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Demak cenderung meningkat (baik secara kualitas maupun kuantitas) dari tahun ke tahun, namun dari semua kasus hukum yang ditangani Polres Demak tidak ada satupun yang melibatkan pelajar. Kegiatan penyuluhan dan razia dengan sasaran pelajar di Kabupaten Demak setidaknya masih menjadi *shock therapy* yang ampuh. Hasilnya, kasus penyalahgunaan dan peredaran Narkoba di kalangan pelajar dapat diminimalisir, bahkan tidak ditemukan adanya pemakai Narkoba yang masih berusia sekolah.

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja indikator adalah :

- 1) Adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten (Bupati dan Wakil Bupati) yang terkait langsung dengan akhlak generasi muda, yaitu Gerakan Maghrib... Matikan TV, Ayo Mengaji (matikan televisi pada pukul 18.00 – 21.00 WIB). Bahkan dalam arahan Bupati dan Wakil Bupati kepada para Siswa setingkat SLTP dan SLTA gerakan Moral Matikan TV ditambahi menjadi “Gerakan Maghrib.... Matikan TV, Matikan HP Ayo Mengaji”.
- 2) Dukungan regulasi dari pemerintah pusat terkait penyalahgunaan Narkoba sangat jelas dan tegas.
- 3) Peran tokoh agama, tokoh masyarakat, pendidik maupun keluarga yang saling bergandengan tangan menjaga generasi muda dari hal-hal yang bersifat negatif.

b. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan pencapaian kinerja adalah :

- 1) Perkembangan teknologi menjadikan tidak ada lagi batasan ruang dan waktu (borderless). Kemudahan akses akibat perkembangan teknologi yang tidak didasari oleh kekutan

moral dan akhlaq yang baik, maka teknologi dapat merusak moral anak dan pelajar.

- 2) Penyalahgunaan Narkoba sudah merambah di semua lini, baik itu di kalangan akademisi, birokrat maupun masyarakat awam sekalipun.

c. Strategi pemecahan masalah :

- 1) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh lembaga pendidikan baik formal maupun non formal.
- 2) Penguatan kelembagaan yang fokus pada pencegahan dan penanganan penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Demak melalui Pembentukan Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK) Kabupaten Demak.

d. Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 3

Guna mewujudkan tercapainya kinerja pada Sasaran 3 diperlukan program dan kegiatan yang berfungsi sebagai penunjang keberhasilan kinerja yaitu program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dengan kegiatan penyuluhan pencegahan Peredaran/penggunaan minuman keras dan Narkoba dengan penyerapan anggaran sebesar 99,17%.

Tabel Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran	% Penyerapan Anggaran
3.	Menurunnya jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba di kalangan generasi muda pelajar Kabupaten Demak	Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba di kalangan generasi muda	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat 1. Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan Narkoba	99,17 99,17

e. Efisiensi Sumber Daya Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	% Capaian Kinerja keseluruhan ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)	Tingkat Efektifitas (%)
3.	Menurunnya jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba di kalangan generasi muda pelajar Kabupaten Demak	Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba di kalangan generasi muda	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	100	99,84	0,16	100,16

4. Sasaran 4 (meningkatnya kehidupan berdemokrasi dan partisipasi politik masyarakat)

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Mewujudkan nilai-nilai demokrasi agar tercipta di kehidupan sehari-hari memang tidak mudah, oleh karena itu kita sebagai masyarakat harus lebih memahami lagi dan masih perlu pembelajaran, agar Suatu hari nanti, kita berharap bahwa demokrasi telah benar-benar membudaya di tanah air kita, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga terciptanya demokrasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan politik adalah aktifitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu. Ia meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, meliputi juga loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik. Disamping itu, ia bertujuan agar setiap individu mampu memberikan partisipasi politik yang aktif di masyarakatnya. Pendidikan politik merupakan aktifitas yang terus berlanjut sepanjang hidup manusia dan itu

tidak mungkin terwujud secara utuh kecuali dalam sebuah masyarakat yang bebas.

Pendidikan politik memiliki tiga tujuan yaitu membentuk kepribadian politik, kesadaran politik, dan partisipasi politik. Pembentukan kepribadian politik dilakukan melalui metode tak langsung, yaitu pelatihan dan sosialisasi, serta metode langsung berupa pengajaran politik dan sejenisnya. Untuk menumbuhkan kesadaran politik ditempuh dua metode yaitu dialog dan pengajaran instruktif. Adapun partisipasi politik, ia terwujud dengan keikutsertaan individu-individu secara sukarela dalam kehidupan politik masyarakatnya.

Peran sosialisasi dan pendidikan politik adalah tanggung jawab bersama penyelenggara Pemilu, namun peran dalam jangka waktu yang relatif sempit tidak akan mampu menyentuh masyarakat secara keseluruhan. Peran yang massif terhadap pendidikan politik sesungguhnya ada di tangan Partai Politik yang secara normatif merupakan lembaga yang mempunyai kewajiban memberikan pendidikan politik pada masyarakat serta tentunya Pemerintah dalam hal ini adalah Kantor Kesbangpolinmas secara konsisten melakukan pendidikan politik dengan salah satu sasaran utama yaitu Parpol.

Tingkat capaian kinerja beberapa indikator dalam sasaran cukup memuaskan, bahkan ada yang melebihi target yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut merupakan keberhasilan bersama, jejaring yang telah terbangun selama ini yaitu antara Pemerintah dengan Parpol, LSM, Ormas, Yayasan dan masyarakat berjalan cukup optimal.

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah :

- 1) Tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi pada ruang publik dengan mendirikan atau bergabung dengan perkumpulan dan Ormas cukup tinggi.
- 2) Adanya website Kantor Kesbangpolinmas yaitu www.kesbangpolinmas.demakkab.go.id memudahkan koordinasi dengan seluruh stakeholder.

- b. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan adalah :
- 1) Tidak adanya kewajiban bagi Ormas untuk mendaftarkan diri dan atau memberitahukan keberadaannya ke pemerintah menyebabkan pendataan dan pemantauan di wilayah menjadi terhambat.
 - 2) Sistem aplikasi database Parpol dan Ormas secara nasional masih belum bisa digunakan secara maksimal.
- c. Strategi pemecahan masalah :
- 1) Memberdayakan seluruh stakeholder terutama Parpol dan Ormas dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik.
 - 2) Meningkatkan peran dan fungsi Parpol dalam pendidikan politik.
- d. Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 4
- Program dan kegiatan yang diperlukan sebagai penunjang sasaran guna mewujudkan tercapainya peningkatan jumlah kegiatan pendidikan politik sebagai indikator kinerja sasaran 4 adalah Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan penyerapan anggaran 97,77%

Tabel Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 4

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran	% Penyerapan Anggaran
1.	Meningkatnya kehidupan berdemokrasi dan partisipasi politik masyarakat	Persentase peningkatan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	Pendidikan Politik Masyarakat 1. Penyuluhan kepada Masyarakat 2. Penyusunan database Parpol dan Ormas 3. Koordinasi forum-forum diskusi politik 4. Verifikasi Kegiatan Parpol dan Ormas	97,77
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu		99,95 65,25 98,26 98,88

e. Efisiensi Sumber Daya Sasaran 4

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	% Capaian Kinerja keseluruhan ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)	Tingkat Efektifitas (%)
4.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan	1. Persentase peningkatan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah 2. Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Pendidikan Politik Masyarakat	91,06	97,77	2,33	102,33

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2018, Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Demak mendapatkan anggaran sebesar Rp. 3.627.787.500,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 889.625.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.402.000.000,-. Adapun untuk realisasinya yaitu belanja tidak langsung Rp. 824.711.903 (92,70%) dan belanja langsung Rp. 2.338.480.967 (97,36%).

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Pagu / Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kesadaran aparat dan stakeholder terhadap nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai keagamaan serta kerukunan antar / intra umat beragama	Presentase ormas yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	50	50	100	634.15.000	611.795.000	96,47
		Persentase Ormas aktif	38,89	36,53	93,93			
		Kasus Konflik Antar Umat Beragama	0 kasus	0 kasus	100			
		Keberadaan Aliran yang menyimpang dari nilai agama	0 kasus	0 kasus	100			
2.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah serta terdeteksinya potensi kerawanan sosial	Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat	100	100	100	928.000.000	900.174.653	97,00
3.	Menurunnya jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba di kalangan generasi muda pelajar Kabupaten Demak	Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba di kalangan generasi muda	100	100	100	30.000.000	29.750.000	99,17
4.	Meningkatnya kehidupan berdemokrasi dan partisipasi politik masyarakat	Persentase peningkatan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	20	20	100	461.517.000	451.220.000	97,77
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	70	57,48	82,11			

BAB IV

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KANTOR KESBANGPOLINMAS

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*). Dari Pengukuran Pencapaian Sasaran serta pembobotan seperti yang telah diuraikan, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pencapaian sasaran yang telah dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak tahun 2016 adalah sebagai berikut :

$$\frac{98,48 + 100,00 + 100,00 + 91,06}{4} = 97,38 \%$$

artinya dapat dikategorikan **AMAT BAIK**.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kantor Kesbangpolinmas Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa sasaran sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis Kantor Kesbangpolinmas Tahun 2016 – 2021 dikategorikan Amat Baik. Di antara capaian 4 (empat) sasaran, sebanyak 2 (dua) sasaran dengan capaian Sangat Baik dan 2 (dua) sasaran dengan capaian Baik.

B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA MENDATANG

Secara ringkas dapat dituliskan beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Kantor Kesbangpolinmas selama tahun 2018 yaitu:

1. Adanya regulasi yang jelas dari Pemerintah Pusat terkait program kegiatan yang dilaksanakan Kantor Kesbangpolinmas;
2. Situasi dan kondisi sosial politik nasional yang cukup kondusif;
3. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Instansi lain maupun dengan masyarakat dalam pelaksanaan program kegiatan;
4. Tersedianya berbagai kemudahan terutama dalam hal akses informasi sehingga memudahkan Kantor Kesbangpolinmas melaksanakan koordinasi vertikal maupun horizontal.

Beberapa faktor - faktor penyebab/penghambat keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

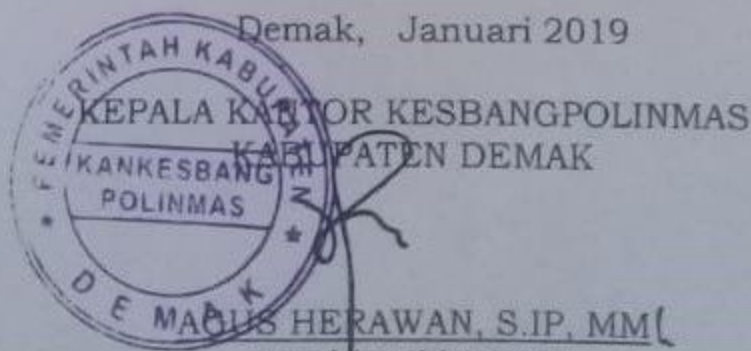
1. Regulasi yang ada terkadang belum dibarengi sosialisasi sehingga kadangkala terjadi kekurangpahaman pada tingkat pelaksana;
2. Implementasi dari Peraturan Bupati terkait Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD bagi Ormas, LSM, Yayasan sedikit menimbulkan crowded terkait masalah administrative dikarenakan perbedaan persepsi dalam memahami perundangan;
3. Koordinasi yang ada terkadang berjalan lamban karena kesibukan masing-masing;
4. Ekses dari perkembangan teknologi menyebabkan masyarakat cenderung mudah tersulut/terprovokasi.
5. Kesadaran Ormas/LSM mendaftarkan dan melaporkan kegiatan dan keberadaan yang kurang menyebabkan database ormas/LSM kurang bisa diupdate sesuai kondisi real.

Terhadap semua kendala yang menghambat keberhasilan kinerja Kantor Kesbangpolinmas, beberapa langkah antisipatif yang dilakukan antara lain :

1. Pro aktif terhadap perkembangan situasi dan kondisi dengan senantiasa meng *up date* peraturan dan atau berita terkini;
2. Pelaksanaan koordinasi secara terus menerus tanpa harus menunggu terjadinya permasalahan;
3. Pelaksanaan piket Kantor Kesbangpolinmas sebagai bagian dari deteksi dini situasi dan kondisi wilayah Kabupaten Demak.
4. Mensosialisasikan kepada Ormas/LSM untuk melaporkan keberadaan dan kegiatan kepada Pemerintah Kab. Demak cq. Kantor Kesbangpolinmas.

Kami menyadari bahwa LKj IP ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu diharapkan masukan dari berbagai pihak terkait guna perbaikan di tahun mendatang.

Demak, Januari 2019



ABUS HERAWAN, S.IP, MM (Pembina Tingkat I
NIP. 19710612 199003 1 004